



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Potensi Bitcoin sebagai Mata Uang Perdagangan Internasional: Dampaknya terhadap Hegemoni Dolar AS dan Struktur Keuangan Global

Fauzi Firdaus¹, Maharani Hana Maleeka², Nayla Dwi Alperina³, Widia Sri Meidiva⁴

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, fauzi.firdaus1786@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Riau, Indonesia, maharani.hana0143@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, nayla.dwi2200@student.unri.ac.id

⁴Universitas Riau, Riau, Indonesia, widia.sri2442@student.unri.ac.id

Corresponding Author: fauzi.firdaus1786@student.unri.ac.id¹

Abstract: *The global financial system faces a transition due to digital innovation, yet the dominance of the United States dollar remains robust, supported by institutional stability, market depth, and geopolitical influence. This research aims to assess the current state of dollar dominance, analyze the opportunities and constraints of Bitcoin in international trade, and understand the impact of financial digitalization and geopolitics on the monetary order. The main research objects are the competition between the United States dollar and Bitcoin, alongside the development of central bank digital currencies. Employing a qualitative approach utilizing secondary data from academic articles and official reports, the study finds that while Bitcoin offers advantages in cost efficiency and speed that appeal at the micro-level even serving as an alternative route to bypass sanctions it fails to challenge systemic dollar dominance due to extreme price volatility and fragmented global regulation. Meanwhile, the push for de-dollarization from major nations and the development of central bank digital currencies indicate an increasingly diverse global currency competition, though the dollar's structural inertia remains the biggest obstacle to such a shift.*

Keyword: *US Dollar Hegemony, Bitcoin, CBDC (Central Bank Digital Currency, De-dollarization, International Trade*

Abstrak: Sistem keuangan global menghadapi transisi akibat inovasi digital, namun dominasi dolar Amerika Serikat masih bertahan kuat, didukung oleh stabilitas institusional, kedalaman pasar, dan pengaruh geopolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi dominasi dolar, menganalisis peluang serta hambatan Bitcoin dalam perdagangan internasional, dan memahami pengaruh digitalisasi finansial dan geopolitik terhadap tatanan moneter. Objek riset utama adalah persaingan antara dolar Amerika Serikat dan Bitcoin, ditambah perkembangan mata uang digital bank sentral. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder berupa artikel ilmiah dan laporan resmi, studi ini menemukan bahwa meskipun Bitcoin menawarkan keunggulan efisiensi biaya dan kecepatan yang menarik pada

level mikro bahkan sebagai jalur alternatif menghindari sanksi ia gagal menantang dominasi dolar secara sistemik karena volatilitas harga yang ekstrem dan fragmentasi regulasi global. Sementara itu, dorongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dari negara-negara besar dan pengembangan mata uang digital bank sentral menunjukkan persaingan mata uang global yang semakin beragam, meskipun inersia struktural dolar tetap menjadi penghalang terbesar bagi perubahan tatanan tersebut.

Kata Kunci: Hegemoni Dolar AS, Bitcoin, CBDC, De-dollarization, Perdagangan International

PENDAHULUAN

Sistem keuangan internasional kini memasuki fase transisi besar akibat munculnya inovasi berbasis digital yang mulai meruntuhkan pola lama dalam peredaran uang dan pengelolaan transaksi global. Di tengah perubahan ini, dominasi dolar Amerika Serikat (USD) masih tampak kuat, terutama karena posisinya sudah tertanam dalam arsitektur ekonomi dunia selama beberapa dekade. Keunggulan USD tidak hanya terbentuk dari ukuran ekonomi AS, tetapi juga dari kepercayaan global terhadap stabilitas institusi keuangan dan kebijakan moneter, yang sejak lama menjadi rujukan bagi negara lain (Skopiec, 2025). Selain fondasi ekonomi, pengaruh geopolitik AS membuat dolar tetap menjadi pilihan utama. Pemerintah AS memiliki kemampuan menggunakan instrumen finansial termasuk sistem pembayaran internasional dan sanksi ekonomi untuk mempertahankan ruang manuvernya dalam percaturan global (McDowell, 2023). Penggunaan sanksi ini bukan hanya alat penekan politik, tetapi juga semacam “pengingat” bagi negara lain bahwa keterhubungan mereka dengan sistem berbasis dolar membawa konsekuensi strategis. Faktor-faktor tersebut membuat ketergantungan negara terhadap USD bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari struktur kekuasaan yang sudah mengakar dan sulit digantikan begitu saja. Dengan kekuatan ekonomi, legitimasi institusional, dan pengaruh geopolitik yang saling menopang, USD membentuk jejaring penggunaan global yang stabil. Bahkan ketika muncul alternatif digital seperti aset kripto atau mata uang digital bank sentral (CBDC), dominasi dolar tetap sulit digoyahkan karena sistem yang menopangnya sudah terlanjur menjadi fondasi bagi perdagangan, investasi, dan penyelesaian transaksi internasional.

Di tengah struktur keuangan global yang sudah sangat mapan, Bitcoin muncul sebagai inovasi yang menawarkan mekanisme transaksi lintas batas yang berbeda dari sistem tradisional. Karena sifatnya yang terdesentralisasi tidak berada di bawah kendali pemerintah atau bank sentral mana pun Bitcoin mulai menarik perhatian kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Di wilayah yang menghadapi biaya remitansi tinggi, inflasi kronis, atau akses terbatas terhadap layanan perbankan, aset ini sering dipandang sebagai jalan keluar yang lebih cepat dan lebih murah dibanding layanan pengiriman uang konvensional. Beberapa negara di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin sudah memperlihatkan pola penggunaan seperti ini, terutama untuk transfer dana lintas negara dan pembayaran sehari-hari yang membutuhkan efisiensi lebih besar (Salehi et al., 2024). Namun, meskipun adopsi di tingkat pengguna meningkat, kemampuan Bitcoin untuk benar-benar menantang posisi USD masih terhambat oleh dua faktor besar. Pertama, volatilitas harganya yang ekstrem membuat Bitcoin sulit diperlakukan sebagai penyimpan nilai yang stabil, sesuatu yang menjadi syarat utama bagi mata uang global. Kedua, regulasi yang belum seragam di berbagai yurisdiksi menciptakan ketidakpastian bagi institusi maupun negara yang ingin mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan mereka (Baur & Dimpfl, 2021). Kondisi ini membuat Bitcoin tetap berada dalam posisi ambigu: menarik sebagai

alternatif pada level mikro, tetapi belum mampu menggoyang dominasi dolar pada level sistemik.

Perubahan global tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan aset digital. Negara-negara besar kini aktif mengembangkan mata uang digital bank sentral (CBDC), dan inisiatif seperti *Digital Silk Road* menandai upaya strategis untuk memodernisasi jaringan keuangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar (Ba & Şen, 2024). Kemunculan teknologi baru ini menambah lapisan kompetisi yang berbeda: bukan hanya antara USD dan Bitcoin, tetapi antara mata uang negara dengan sistem moneter terdesentralisasi yang membawa logika ekonomi tersendiri. Di tengah dinamika tersebut, penelitian ini berupaya mengurai tiga persoalan utama, yang pertama mengenai sejauh mana Bitcoin dapat mengurangi dominasi USD. Apa saja manfaat dan batasan yang membentuk pola adopsinya, terutama di negara berkembang. Dan bagaimana faktor geopolitik dan perkembangan CBDC dapat memengaruhi arah persaingan antara mata uang digital terdesentralisasi dan mata uang negara. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menilai kondisi aktual dominasi USD, menganalisis peluang dan hambatan Bitcoin dalam perdagangan internasional, serta memahami bagaimana digitalisasi finansial dan perubahan geopolitik dapat membuka kemungkinan munculnya tatanan moneter global yang lebih beragam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, serta dinamika sosial yang terkait dengan persaingan antara Bitcoin dan dolar AS dalam perdagangan internasional. Sesuai panduan Creswell & Poth (2018), pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan eksplorasi komprehensif terhadap fenomena yang kompleks melalui interpretasi data dan penelaahan konteks secara holistik. Penelitian ini mengandalkan *data sekunder* berupa artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi resmi lembaga internasional untuk mengidentifikasi pola, temuan empiris, dan perkembangan regulasi yang relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan konsolidasi bukti yang telah dipublikasikan untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perubahan lanskap moneter global dan implikasinya terhadap sistem perdagangan modern.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori, yaitu *Hegemonic Stability Theory* (HST) yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dominasi dolar AS serta keterbatasan Bitcoin sebagai mata uang perdagangan internasional. *Hegemonic Stability Theory* dari Robert O. Keohane menjelaskan bahwa keteraturan dan stabilitas dalam sistem internasional bergantung pada keberadaan satu aktor negara yang memiliki kapasitas untuk menyediakan barang-barang publik global, termasuk stabilitas moneter, keamanan perdagangan, serta infrastruktur pembayaran internasional (Keohane, 1984). Teori ini menjadi dasar untuk memahami dominasi dolar AS sebagai mata uang global, yang tidak hanya bertumpu pada besar dan kuatnya ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga pada kemampuannya menyediakan stabilitas finansial bagi sistem perdagangan internasional. Dominasi ini membuat dolar sulit digantikan karena posisi hegemonik tersebut dibangun oleh fondasi struktural, bukan sekadar efisiensi pasar. Keberhasilan suatu mata uang untuk menjadi standar global tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi maupun popularitas penggunaannya, tetapi juga oleh dukungan institusional dan kapasitas hegemon untuk menjamin stabilitas serta kepercayaan jangka Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi dolar AS (USD) dalam sistem pembiayaan perdagangan internasional pada dasarnya terbentuk dari efek jaringan (*network effects*) yang kuat dan mendalam (Skopiec, 2025). Efek jaringan tersebut menciptakan kecenderungan bagi semakin banyak negara,

bank, dan pelaku perdagangan untuk terus menggunakan USD, karena mereka melihat pihak lain juga melakukannya dan hal itu memberikan rasa aman serta efisiensi dalam transaksi. Setelah pola penggunaan tersebut mengakar, USD akhirnya diposisikan sebagai mata uang standar dalam aktivitas internasional, dan hal ini tampak jelas dalam temuan yang menunjukkan bahwa USD menjadi pilihan umum untuk invoicing, settlement, hingga penyimpanan cadangan devisa di berbagai negara (Chahrour & Valchev, 2022). Konsistensi ini kemudian menciptakan hambatan besar bagi negara atau institusi yang ingin berpindah ke mata uang lain, karena perpindahan tersebut melibatkan biaya, risiko, dan penyesuaian yang tidak sederhana suatu dinamika yang telah ditegaskan dalam kajian mengenai tingginya biaya peralihan (*switching costs*) terkait dominasi mata uang USD (He & Yu, 2016).

Meskipun *network effects* Bitcoin telah menguat secara signifikan sejak tahun 2015 dan menunjukkan dominasi di antara mata uang digital, posisinya masih sebagai mata uang sekunder dibandingkan USD (Gandal & Halaburda, 2016). Namun, meskipun Bitcoin semakin populer, penggunaannya masih terbatas dan belum mampu menggantikan peran USD dalam sistem keuangan global. Hal ini juga berkaitan dengan sifat Bitcoin yang sangat volatil dan berisiko tinggi, sehingga banyak aktor hanya memanfaatkannya sebagai instrumen diversifikasi atau lindung nilai, bukan sebagai alat pembayaran utama dalam perdagangan internasional sebagaimana ditunjukkan dalam temuan studi sebelumnya (Baur et al., 2018). Meski begitu, integrasi pasar Bitcoin semakin meningkat, berbagai kajian menunjukkan bahwa struktur jaringan Bitcoin masih jauh lebih longgar dan belum terhubung sekuat jaringan keuangan berbasis USD, sehingga posisinya tetap berada di level sekunder dalam sistem mata uang global (BenSaïda, 2023).

Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dalam Perdagangan

Adopsi Bitcoin dalam perdagangan global terus meningkat karena mata uang digital ini menawarkan sejumlah keunggulan yang sulit diberikan oleh sistem keuangan tradisional. Kelebihan utamanya meliputi biaya transaksi lintas batas yang lebih rendah, proses pembayaran yang lebih cepat, serta kemampuannya memfasilitasi remitansi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan perbankan formal (Khan et al., 2023). Keunggulan-keunggulan ini penting karena dalam konteks perdagangan internasional, efisiensi biaya dan kecepatan transfer sering menjadi faktor penentu kelancaran arus barang dan modal. Selain itu, sifat Bitcoin yang tidak bergantung pada perantara perbankan membuatnya lebih inklusif bagi pelaku ekonomi yang berada di wilayah terpencil atau negara dengan infrastruktur keuangan yang belum berkembang. Selain itu, sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak memerlukan perantara memungkinkan pengguna untuk menghindari sanksi keuangan tertentu atau kontrol modal, sehingga menjadikannya aset strategis dalam dinamika geopolitik serta di negara-negara yang menerapkan pengawasan ketat terhadap arus keuangan (McDowell, 2023). Hal ini terjadi karena transaksi Bitcoin tidak bergantung pada lembaga keuangan nasional yang dapat dibatasi oleh pemerintah atau komunitas internasional. Dengan kata lain, selama seseorang memiliki akses internet dan dompet kripto, mereka tetap bisa mengirim dan menerima dana lintas negara tanpa harus melewati sistem perbankan yang mudah diawasi atau diblokir. Inilah yang membuat Bitcoin sering dipandang sebagai “jalur alternatif” bagi aktor negara maupun individu di tengah tekanan ekonomi atau pembatasan regulasi.

Namun, adopsi Bitcoin secara arus utama masih menghadapi sejumlah hambatan besar. Volatilitas harga yang ekstrem menjadi kendala utama karena fluktuasi nilai yang sangat tajam membuat Bitcoin sulit berfungsi sebagai alat tukar yang stabil ataupun penyimpan nilai yang dapat dipercaya dalam kegiatan perdagangan sehari-hari (Baur & Dimpfl, 2021). Perubahan harga yang bisa melonjak atau anjlok dalam waktu singkat membuat pelaku usaha enggan menerima Bitcoin sebagai pembayaran, sebab risiko nilai tukar dapat langsung menggerus keuntungan. Bagi konsumen, ketidakpastian ini menurunkan minat menggunakan

Bitcoin sebagai sarana transaksi rutin. Selain volatilitas, fragmentasi dan ketidakpastian regulasi di berbagai yurisdiksi internasional juga menjadi hambatan serius (Sreevas et al., 2024). Setiap negara menerapkan pendekatan yang berbeda ada yang melegalkan dan mendorong inovasi kripto, ada pula yang membatasi atau bahkan melarang total. Ketimpangan regulasi ini membuat bisnis global sulit menyusun strategi jangka panjang karena tidak ada standar internasional yang konsisten. Risiko kebijakan yang berubah tiba-tiba, seperti pembatasan transaksi atau kewajiban kepatuhan tambahan, membuat institusi keuangan besar memilih untuk bersikap hati-hati sebelum mengadopsi Bitcoin secara luas.

Terakhir, dampak lingkungan yang signifikan akibat aktivitas penambangan Bitcoin yang membutuhkan energi sangat besar juga menjadi titik keberatan moral dan struktural bagi adopsi massal (Flores-Castañeda et al., 2025). Proses mining yang mengandalkan perangkat komputasi berdaya tinggi menyebabkan konsumsi listrik dalam jumlah masif, bahkan menyaingi penggunaan energi beberapa negara kecil. Kondisi ini memicu kritik tajam karena dianggap memperburuk jejak karbon global dan bertentangan dengan agenda keberlanjutan yang diusung banyak pemerintah dan perusahaan. Dalam konteks transisi energi hijau, aspek lingkungan menjadi faktor penentu yang membuat adopsi Bitcoin dalam skala global berjalan lebih lambat.

Fragmentasi Regulasi Global

Regulasi global terhadap Bitcoin dan aset kripto hingga saat ini masih menunjukkan Tingkat fragmentasi yang tinggi, di mana setiap negara menerapkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai prioritas domestiknya (Sreevas et al., 2024). Pendekatan yurisdiksi terhadap pengaturan Bitcoin dan aset kripto menunjukkan variasi yang sangat luas, di mana sebagian negara memilih merangkul inovasi melalui kerangka hukum yang mendukung aktivitas bursa, pengembangan teknologi blockchain, serta perlindungan konsumen, sementara negara lain justru menerapkan pembatasan ketat hingga larangan total terhadap penggunaan dan perdagangan aset kripto untuk menjaga kontrol moneter (Ba & Şen, 2024). Kurangnya standar internasional yang terharmonisasi mempersulit integrasi Bitcoin ke dalam pembiayaan perdagangan lintas batas dan menimbulkan tantangan dalam hal Anti Pencucian Uang (AML) dan *Know Your Customer* (KYC) (Chavez-Perez et al., 2025). Perbedaan aturan antarnegara yang membuat verifikasi identitas dan pelacakan dana tidak konsisten meningkatkan risiko penyalahgunaan aset kripto dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri, sehingga menghambat integrasi Bitcoin dalam perdagangan internasional.

Di tengah fragmentasi ini, *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) muncul sebagai instrument digital baru yang didukung negara dan mulai diperhatikan sebagai alternatif dalam system pembayaran modern, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa CBDC berpotensi memengaruhi cara bank sentral menyalurkan kebijakan moneter serta dapat mengubah pola penggunaan dana masyarakat antara CBDC dan deposit bank tradisional (Ozili, 2024). Inisiatif CBDC ini, seperti yuan digital Tiongkok (e-CNY), dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi system pembayaran dan mendukung penggunaan mata uang digital pada skala internasional. Sejumlah temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa uji coba e-CNY telah diarahkan pada penggunaan lintas batas melalui kerja sama regional dan proyek multilateral, yang memungkinkan proses penyelesaian transaksi dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat stabilitas transaksi di kawasan yang terhubung dalam sistem tersebut. Penggunaan e-CNY dalam jaringan perdagangan tertentu berpotensi mengurangi ketergantungan pada mata uang dominan, termasuk dolar, terutama di wilayah yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok (Zhang et al., 2024).

Geopolitik dan Tren De-dollarization

Faktor geopolitik memainkan peran penting dalam mempertahankan maupun menantang hegemoni suatu mata uang. USD tetap dominan karena ditopang oleh kekuatan militer AS, stabilitas institusional, serta kedalaman dan likuiditas pasar keuangan AS yang menjadi yang terbesar di dunia (Palley, 2024). Fondasi struktural ini menciptakan kepercayaan global sehingga dolar berfungsi sebagai alat pembayaran internasional, aset aman, dan cadangan devisa utama. Infrastruktur finansial AS juga membuat transaksi berbasis dolar lebih efisien dibandingkan alternatif lainnya. Namun, penggunaan sanksi finansial oleh AS mendorong meningkatnya upaya *de-dollarization*. Dominasi dolar dalam sistem pembayaran global menjadikan sanksi sangat efektif, sehingga negara-negara yang rentan seperti Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara *Global South* berusaha mencari mekanisme pembayaran alternatif demi mengurangi ketergantungan pada dolar dan memperkuat otonomi strategis mereka.

Negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, bersama sejumlah negara berkembang, semakin aktif mencari dan menguji alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis USD (Middlebrook & Tadaa, 2024). Dorongan ini muncul karena ketergantungan pada dolar dianggap meningkatkan kerentanan terhadap tekanan geopolitik dan sanksi ekonomi yang dapat membatasi ruang gerak ekonomi nasional. Banyak negara berupaya membangun sistem pembayaran bilateral, memperluas penggunaan mata uang lokal, atau mengadopsi instrumen keuangan alternatif untuk mengurangi dominasi dolar dalam transaksi lintas batas mereka. Dalam konteks inilah, Bitcoin menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk *bypass sanksi* dan menghindari kontrol modal, terutama oleh aktor yang menghadapi isolasi finansial (Li & Song, 2024). Karena bersifat terdesentralisasi dan tidak bergantung pada lembaga keuangan AS, Bitcoin memberi jalur transaksi yang relatif sulit diblokir, sehingga menarik bagi negara atau individu yang beroperasi di bawah pembatasan finansial internasional. Meskipun volumenya belum cukup besar untuk menggantikan sistem dolar, fungsi Bitcoin sebagai “jalur alternatif” ini semakin menonjol dalam situasi tekanan geopolitik.

Di sisi lain, Tiongkok memajukan inisiatif *Digital Silk Road (DSR)* dan pengembangan *e-CNY* untuk memperkuat integrasi finansial regional serta mempromosikan multipolaritas mata uang (Middlebrook & Tadaa, 2024). Melalui DSR dan e-CNY, Tiongkok berupaya membangun infrastruktur pembayaran digital yang dapat bersaing dengan jaringan dolar, sekaligus memperluas pengaruh ekonominya di Asia dan kawasan Belt and Road. Semua ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi dominasi sistem keuangan global yang terlalu bergantung pada AS. Meskipun demikian, *inersia struktural USD* tetap menjadi penghalang besar bagi munculnya pesaing yang benar-benar mampu menyaingi dominasinya baik dari sisi mata uang terdesentralisasi seperti Bitcoin maupun instrumen yang didukung negara seperti *Central Bank Digital Currencies (CBDC)* (Palley, 2024). Keunggulan dolar ditopang oleh pasar keuangan AS yang sangat dalam, stabilitas institusional, serta perannya yang mengakar dalam perdagangan internasional. Faktor-faktor ini menciptakan hambatan tinggi bagi upaya *de-dollarization*, sehingga proses perubahan tatanan mata uang global berjalan lambat meskipun tekanan geopolitik semakin meningkat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun adopsi Bitcoin sebagai mata uang perdagangan global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan ataupun tatanan moneter global berada di ambang pergeseran menuju sistem yang lebih beragam, namun hegemoni dolar AS (USD) tidak akan tergantikan dalam waktu dekat. Perannya paling akurat didefinisikan sebagai pengikis dominasi inkremental, bukan sebagai pengganti langsung terhadap hegemoni dolar AS (USD). Dominasi USD dipertahankan oleh

network effects yang sangat dalam, entrenched, dan *self-reinforcing*, serta likuiditas pasar keuangan Amerika dan kepercayaan institusional yang telah terbangun selama puluhan tahun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan biaya peralihan yang sangat tinggi bagi negara-negara dan institusi untuk meninggalkan sistem berbasis dolar. Bitcoin, di sisi lain, menawarkan keunggulan dalam kecepatan, pengurangan biaya transaksi lintas batas, dan desentralisasi yang menarik bagi entitas yang berusaha menghindari kontrol modal atau sanksi geopolitik. Namun, nilai fungsional Bitcoin dalam perdagangan arus utama terhambat secara signifikan oleh masalah internal seperti volatilitas harga yang ekstrem yang membatasi fungsinya sebagai alat tukar yang andal, ditambah dengan tantangan eksternal berupa fragmentasi regulasi global dan masalah dampak lingkungan yang tinggi (*energy-intensive mining*).

Temuan mengenai dinamika persaingan ini memberikan kontribusi penting bagi sains dan praktik di luar ekonomi tradisional. Secara umum, penelitian ini memperkaya bidang sistem informasi dan ekonomi jaringan dengan menegaskan bahwa arsitektur teknologi terdesentralisasi seperti Bitcoin dapat membuka jalur perdagangan dan remitansi baru yang tidak dapat diakses oleh sistem perbankan tradisional. Kontribusi ini menunjukkan bahwa hegemoni mata uang kini semakin bergantung pada kekuatan infrastruktur protokol dan adopsi jaringan digital, membuka peluang penelitian lebih lanjut dalam memprediksi perubahan finansial melalui model ilmu jaringan. Sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami bagaimana digitalisasi finansial dan perubahan geopolitik dapat membuka kemungkinan munculnya tatanan moneter global yang lebih beragam, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor geopolitik dan perkembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) akan menjadi penentu utama. CBDC diposisikan sebagai alternatif digital yang didukung negara, menciptakan pesaing institusional yang lebih stabil terhadap USD, sementara Bitcoin tetap menjadi mekanisme pelengkap di tingkat individu, terutama untuk menghindari sanksi dan kontrol modal.

Melihat ke depan, skenario yang paling mungkin terjadi adalah pergeseran bertahap menuju sistem moneter multipolar yang ditandai oleh koeksistensi USD yang dominan, CBDC yang teregulasi, dan aset terdesentralisasi. Oleh karena itu, implikasi dan saran utama ditekankan pada adaptasi: Pemerintah harus fokus pada harmonisasi regulasi aset digital secara global untuk memitigasi risiko sistemik sambil memastikan inovasi teknologi tetap berjalan. Selain itu, investasi dalam CBDC menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan moneter di era digital. Bagi pelaku pasar, saran strategis adalah meningkatkan kapabilitas manajemen risiko terhadap volatilitas kripto dan mendiversifikasi opsi penyelesaian perdagangan untuk memanfaatkan efisiensi *blockchain* di wilayah yang kurang terlayani. Untuk memandu transisi ini, penelitian lanjutan sangat diperlukan. Ada kebutuhan mendesak untuk studi jangka panjang (*longitudinal*) yang mengukur dampak sistemik Bitcoin dan CBDC terhadap transmisi kebijakan moneter global dan stabilitas keuangan, serta menilai secara definitif biaya eksternal dari penambangan Bitcoin untuk merumuskan strategi keuangan digital yang benar-benar berkelanjutan.

REFERENSI

- Ba, H.-L., & Şen, Ö. F. (2024). Explaining variation in national cryptocurrency regulation: implications for the global political economy. *Review of International Political Economy*, 31(5), 1472–1495. <https://doi.org/10.1080/09692290.2024.2325403>
- Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 61(5), 2663–2683. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5>
- Baur, D. G., Dimpfl, T., & Kuck, K. (2018). Bitcoin, gold and the US dollar – A replication and extension. *Finance Research Letters*, 25, 103–110.

- <https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.10.012>
- BenSaïda, A. (2023). The linkage between Bitcoin and foreign exchanges in developed and emerging markets. *Financial Innovation*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00454-w>
- Chahrour, R., & Valchev, R. (2022). Trade Finance and the Durability of the Dollar. *Review of Economic Studies*, 89(4), 1873–1910. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab072>
- Chavez-Perez, J., Melgarejo-Espinoza, R., Sevillano-Vega, V., & Iparraguirre-Villanueva, O. (2025). Impact of Cryptocurrencies and Their Technological Infrastructure on Global Financial Regulation: Challenges for Regulators and New Regulations. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 16(4), 802–814. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160480>
- Flores-Castañeda, R. O., Olaya-Cotera, S., Sánchez Atuncar, G., & Iparraguirre-Villanueva, O. (2025). Systematic review of the global impact of cryptocurrencies: adoption factors, challenges, environmental effects and cyber risks. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02225-4>
- Gandal, N., & Halaburda, H. (2016). Can we predict the winner in a market with network effects? Competition in cryptocurrency market. *Games*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/g7030016>
- He, D., & Yu, X. (2016). Network effects in currency internationalisation: Insights from BIS triennial surveys and implications for the renminbi. *Journal of International Money and Finance*, 68, 203–229. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.07.009>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Khan, R., Dhaliwal, N., Deorari, R., Anoosha, P., Hussein, A., & Alazzam, M. B. (2023). The way to implement Cryptocurrency for International Payments and Remittances. *2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering, ICACITE 2023*, 226–229. <https://doi.org/10.1109/ICACITE57410.2023.10183323>
- Li, H., & Song, T. (2024). Regime dependent dynamics of parallel and official exchange markets in China: evidence from cryptocurrency. *Applied Economics*, 56(41), 4952–4973. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2227418>
- McDowell, D. (2023). Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash against the Dollar. In *Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash against the Dollar*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197679876.001.0001>
- Middlebrook, P. J., & Tadaa, A. (2024). The Rise of China and De-Dollarization in a Multi-polar Digital World. In *The Great Power Competition: the Rise of China: Volume 6* (Vol. 6, pp. 207–221). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70767-4_10
- Ozili, P. K. (2024). Central bank digital currency and the monetary policy and financial stability implications. In *Digital Currency Assets and Challenges to Financial System Stability* (pp. 52–62). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/9798369307700.ch004>
- Palley, T. (2024). Theorizing dollar hegemony: The political economic foundations of exorbitant privilege. In *Dollar Hegemony: Past, Present, and Future* (pp. 20–56). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781035320936.00005>
- Salehi, S. H., Shafae, S. M. M., Golmohammadi, V., & Haji-Yousefi, A. M. (2024). China's de-dollarization policy and its impact on the hegemony of the us dollar. *Countries Studies*, 2(2), 189–220. <https://doi.org/10.22059/jcountst.2023.367816.1075>
- Skopiec, D. (2025). The prospects for the US dollar as the dominant international currency. *Bank i Kredyt*, 56(5), 557–592. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.3048>

- Sreevas, V. T. K., Hendra, H., Kulkarni, P., Pandiya, B., & Sharma, A. K. (2024). International cooperation in fintech regulation. In *Examining Global Regulations During the Rise of Fintech* (pp. 163–186). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3803-2.ch007>
- Zhang, F., Cui, Y., & Campbell-Verduyn, M. (2024). Digital RMB vs. Dollar Hegemony? Friendly Foes in China-US Currency Competition. *Journal of Chinese Political Science*, 29(3), 483–508. <https://doi.org/10.1007/s11366-023-09876-w>